

Pengembangan Model PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) Guru SMK di Provinsi DKI Jakarta

Muksin

Email: muksin@unj.ac.id

Program Studi Pendidikan Teknik Elektro

Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

Saat ini pemerintah telah memiliki program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Orientasi PKB tersebut memiliki tujuan dan pencapaian standar kompetensi dan pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran berkualitas dan peningkatan karir guru. Dilihat dari ruang lingkup pembinaan dan pengembangan guru pada program PKB tersebut masih pada tataran pembinaan dan pengembangan guru secara umum. Sehingga perlu model khusus yang terarah kepada guru SMK. Oleh karena itu, dalam memenuhi pembinaan dan pengembangan guru SMK, terutama yang berkaitan dengan pengembangan keprofesian guru SMK sangat perlu untuk dilakukan pengembangan pembinaan dan pengembangan profesi guru SMK secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan guru SMK secara bertahap dan berkelanjutan. Sehingga, pembinaan dan pengembangan profesi guru SMK dapat dilakukan dengan pengembangan model keprofesian guru SMK berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik pendidikan kejuruan.

Kata kunci: Guru profesional, Kinerja Guru, Pengembangan keprofesian berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Daya saing dan daya tahan sumber daya manusia merupakan persyaratan yang diperlukan dalam perkembangan ekonomi dan pendidikan suatu bangsa. Walaupun ada upaya-upaya mengkoreksi tesis *Human Resources' Development* (HRD) dengan pemikiran-pemikiran yang menekankan kepada perkembangan dan keterwujudan kemampuan manusia atau *Human Capacity Development* (HCD), yang menunjuk pada kontelasi kemampuan

akademik dan keterampilan, sikap dan perilaku dalam menuju kemandirian (Conny, 1998:14), tetapi kedua pemikiran tersebut menekankan pada betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya tahan dan daya saing tinggi.

Kondisi kualitas sumber daya manusia Indonesia dibanding negara-negara lain masih ketinggalan. Berdasarkan *Human Development Report UNDP (2014)*, pada tahun 2013 *Human Development Index* Indonesia sebesar 0,684, dan menduduki peringkat ke 108 dari 187 negara pada kategori *Medium Human Development*. Posisi Indonesia 46 tingkat dibawah Malaysia yang ada pada peringkat 62 dunia dengan index 0,773. Sementara itu, berada pada 13 tingkat di atas Vietnam yang berada di peringkat 121 dengan index 0,638 (UNDP, 2014: 194). Indikator kualitas sumber daya manusia tersebut menunjukkan bahwa kita masih ketinggalan dengan negara tetangga dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Membangun pendidikan yang bermutu dan berkualitas, tidak cukup hanya melengkapi sarana dan prasarananya, tetapi juga harus mencakup peningkatan kualitas guru dan sub-sub sistem lainnya.

Kualitas manusia Indonesia dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kualitas dan mutu yang baik ditentukan oleh pendidikan sebagai suatu sistem yang meliputi sub sistem yang meliputi konteks, input, proses, output dan outcome yang saling terkait dan bersinergi (Slamet PH, 2013: 12). Salah satu komponen dalam sub sistem input pendidikan sebagai sistem adalah pendidik atau guru. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu juga, guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif.

Guru senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas (Mohamad Surya, 2002: 323., Mulyasa, 2012: 7., Tilaar, 2012: 167). Oleh sebab itu, kedudukan dan fungsi guru

harus tetap diarahkan pada pembinaan yang lebih profesional sesuai dengan kebutuhan guru yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta menunjang kepuasan kerja bagi guru. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova mengatakan dunia menghadapi masalah guru, baik soal jumlah maupun kualitas (Kompas, 6 Oktober 2014, 11). Senada dengan itu, menurut Tilaar (2012: 374) gejala menurunnya kualitas guru bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala internasional. Mungkin saja hal ini disebabkan karena profesi guru tidak dapat bersaing dengan profesi-profesi lainnya. Entah karena begitu banyaknya manipulasi, pendidikan bangsa tidak kunjung membaik bahkan terpuruk oleh gemerlapnya modernisasi yang serba praktis, sehingga sedikit banyak berdampak pada dangkalnya pola pikir peserta didik.

Sejauh ini pemerintah sudah ekstra keras mengangkat pendidikan bangsa dengan anggaran 20 persen dari APBN dipandang cukup untuk menopang pendidikan. Sekitar 50 persen dari total anggaran fungsi pendidikan tahun 2015, senilai RP. 40,9 Triliun, dialokasikan untuk membiayai gaji dan tunjangan profesi guru. Namun, guru menganggap jumlah anggaran itu belum signifikan untuk meningkatkan kualitas (Kompas, 10 Oktober 2014, 11). Terkait peningkatan budget APBN untuk pembayaran tunjangan profesi namun tidak juga diimbangi peningkatan mutu guru, ketua umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyio mengatakan peningkatan mutu guru tidak serta merta terjadi setelah menerima tunjangan profesi, karena memang butuh waktu, disamping itu juga harus ada peran pemerintah untuk melibatkan guru dalam berbagai pelatihan. sementara itu, masih berkaitan dengan dana tunjangan profesi guru sesuai saran Bappenas pada waktu yang akan datang akan diberikan berdasarkan kinerja guru sesuai hasil penilaian yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Mutu Pendidikan (BPSDMPMP) Kemdikbud (Kompas, 16 Oktober 2014, 16). Sementara itu, ketika pemerintah sudah memperjuangkan nasib guru berupa sertifikasi justru disalahgunakan. Demikian realitasnya, setelah mendapat sertifikasi tidak sedikit guru yang mengajar sebatas memenuhi jam kerja. Hal senada juga diungkapkan oleh Tilaar (2012, 44-45) yang mengatakan dalam ujian profesionalisme guru baru-baru ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meskipun banyak kekurangannya namun menunjukkan betapa generasi guru dewasa ini banyak yang belum memenuhi syarat kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis. Demikian pula beberapa penelitian menunjukkan *performance* guru-guru yang

telah mempunyai sertifikat ternyata tidak lebih baik dari guru-guru yang belum memiliki sertifikat (Badrun Kartowagiran, 2011; Kardiyem, 2013; Hurmaini, 2011). Jika demikian program sertifikasi sebenarnya bukan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan tetapi lebih kepada peningkatan pendapatan gaji pendidik. Oleh karena itu, membenahi profesi guru tidaklah mudah. Masalah guru bukan hanya masalah penggajiannya yang rendah, juga bukan disebabkan karena masalah-masalah teknis belaka, tetapi merupakan suatu masalah yang kompleks, karena merupakan refleksi dari perubahan besar di dalam masyarakat kita, yaitu pentingnya upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia (Tilaar, 2013: 375).

Secara legitimasi pencanangan Guru sebagai profesi pada tanggal 4 Desember 2004 oleh pemerintah merupakan awal milestone pembinaan guru sebagai profesi. Sejalan dengan pencanangan tersebut telah terbit dan diberlakukan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan lainnya sebagai dasar hukum yang mengatur guru sebagai profesi tersebut. Hingga akhir tahun 2013 profesi guru dengan segala dinamika permasalahan dan pengembangannya masih jauh dari yang diharapkan yang mencerminkan profesionalisme sebagai seorang guru.

Pada tahun 2012 telah dilakukan ujian kompetensi awal (UKA) bagi guru yang akan mengikuti program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan data hasil uji kompetensi awal (UKA) guru diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata nasional adalah 42,25 untuk skala nilai 0-100. Artinya, nilai rata-rata nasional tingkat kompetensi guru masih cukup jauh dibawah angka 50, atau angka separuhnya dari nilai ideal. Nilai tertinggi adalah 97,0 dan nilai terendah adalah 1,0. Jumlah guru terbanyak, sekitar 80-90 ribu orang terdapat pada interval nilai 35-40. Jika dilihat dari daerah sebaran berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia, maka dari jumlah 33 provinsi hanya terdapat 8 (delapan) provinsi saja yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Kedelapan provinsi itu adalah DIY (50,1), DKI (49,2), Bali (48,8), Jatim (47,1), Jateng (45,2), Jabar (44,0), Kepri (43,8), dan Sumbar (42,7). Sedangkan 25 provinsi lainnya memiliki nilai di bawah 42,25, di mana tiga nilai terendah dimiliki oleh provinsi Maluku (34,5), Maluku Utara (34,8) dan Kalimantan Barat (35,4). Apabila dilihat dari jenjang sekolah, maka nilai tertinggi rata-rata nasional diperoleh guru TK (58,9), kemudian diikuti guru SMA (51,3), guru SMK (50,0), guru SLB (49,1), guru SMP (46,1), dan nilai terendah diperoleh guru SD (36,9).

Secara khusus kondisi guru pada jenjang sekolah SMK berdasarkan nilai hasil UKA berada pada posisi diatas rata-rata nilai nasional, yaitu 50.0. dengan perincian nilai tertinggi 97.0 dan terendah 4.0 dengan standar deviasi 12.07, dengan jumlah peserta sebanyak 15.105. Walaupun demikian Hal ini mengindikasikan masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru SMK.

Sementara itu, berdasarkan nilai hasil uji kompetensi guru (UKG) secara online yang dilakukan terhadap guru setelah memperoleh sertifikat profesional, maka diperoleh nilai rata-rata nasional sebesar 45,82 untuk skala nilai 0-100. Artinya, nilai rata-rata nasional masih dibawah angka 50, atau kurang dari separuh angka ideal. Nilai tertinggi adalah 96,25 dan nilai terendah adalah 0,0. Jumlah guru terbanyak, sekitar 60-70 ribu orang terdapat pada interval nilai 42-43. Jika dilihat dari daerah sebaran berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia, maka dari jumlah 33 provinsi hanya terdapat 7 (tujuh) provinsi saja yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Ketujuh provinsi itu adalah DIY (53,60), Jateng (50,41), Babel (48,25), DKI (47,93), Jatim (47,89), Sumbar (47,21), dan Jabar (46,81). Adapun 26 provinsi lainnya, memperoleh di bawah rata-rata nasional, 45,82, di mana tiga nilai terendah dipegang oleh provinsi Maluku Utara (38,02), Aceh (38,88), dan Maluku (40,00). Apabila dilihat dari jenjang sekolah, maka nilai tertinggi rata-rata nasional diperoleh guru SMP (51,23), kemudian diikuti guru SMK (49,75), guru SMA (47,7), guru TK (45,84), dan nilai terendah diperoleh guru SD (42,05). Secara khusus kondisi guru SMK pada hasil UKG sama dengan hasil UKA yang berada pada posisi diatas rata-rata nasional. Walaupun demikian posisi ini juga mengindikasikan bahwa hasil UKG yang diikuti oleh guru yang telah memiliki sertifikat profesional guru belum juga memuaskan, sehingga diwaktu yang akan datang diperlukan suatu usaha dan program pembinaan profesi dan karir guru yang memiliki dampak pada peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru SMK. Dampak tersebut juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan hasil belajar peserta didik dan kualitas lulusan SMK.

Guru SMK menghadapi banyak tantangan di masa depan. Tantangan guru SMK dapat diprediksi dari arah kebijakan pemerintah dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada pengembangan SMK, guru SMK, dan peserta didik SMK. Beberapa tantangan yang akan dihadapi guru SMK yaitu: (1) tantangan guru SMK dalam menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) tantangan guru SMK menghadapi pembangunan politik dan ekonomi; (3) tantangan guru SMK dalam perkembangan teknologi pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik peserta didik di masa depan; dan (4) tantangan guru SMK dalam melakukan uji kompetensi lulusan SMK (Surya Darma, 2013:182).

Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dunia kerja berjalan lebih cepat daripada perkembangan IPTEK yang terjadi di SMK. Hal ini menyebabkan kompetensi keahlian yang diajarkan guru SMK sering mengalami kesenjangan dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga daya serap lulusan SMK di dunia kerja masih relatif rendah.

Selain itu, rendahnya daya serap lulusan SMK di dunia kerja, menurut Ace Suryadi (2010: 4) dikarenakan proses pendidikan di SMK diindikasikan terdapat gejala yang konsisten bahwa program pendidikan di SMK terisolasi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri. Program pendidikan kejuruan di sekolah kaku dan tidak lentur terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja serta belum berorientasi terhadap kebutuhan pasar kerja yang berubah.

Mendefinisikan kualitas lulusan SMK dan kualitas guru SMK dan mengukurnya merupakan tantangan utama bagi sistem pendidikan kejuruan untuk mencapai target penyediaan tenaga kerja dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Oleh karena itu peran guru SMK menjadi sangat penting dalam turut andil melahirkan lulusan SMK berkualitas. Guru SMK sebagai sosok terdepan di dalam proses pendidikan, dituntut mampu memberikan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan melalui strategi dan pola pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan zaman.

Karakteristik peserta didik SMK yang sekarang sudah berbeda dengan karakteristik peserta didik SMK dimasa lampau maupun dimasa yang akan datang. Sehingga, peran guru SMK menjadi sangat penting dalam turut andil melahirkan lulusan SMK berkualitas. Begitu pula secara khusus untuk guru SMK yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan profesi guru lainnya belum berdampak pada hasil pembelajaran dan kualitas lulusan SMK.

Sebagai profesi, guru SMK merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Guru SMK yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia tersebut diatas. Oleh sebab itu, profesi guru SMK perlu dikembangkan secara terus

menerus dan terencana. Oleh karena itu perlu suatu sistem pengembangan profesional guru SMK yang terus menerus dan profesional bagi guru. Bentuk pembinaan dan pengembangan tersebut selayaknya juga memperhatikan guru-guru SMK yang memiliki karakteristik berbeda dari guru pada umumnya.

Karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi, maka kondisi jabatan guru sebagai profesi dan untuk mewujudkan guru yang profesional serta meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional dibidangnya, maka harus dilakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap guru disemua satuan pendidikan.

Kurangnya publikasi dan penelitian tentang praktek-praktek yang efektif untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam pendidikan kejuruan yang berorientasi pada keprofesionalan guru SMK, perlu dikembangkan model PKB bagi guru SMK yang sekaligus memenuhi tuntutan dan tantangan guru SMK abad 21 yang memiliki karakteristik pendidikan kejuruan di Indonesia. Mengingat pentingnya model pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru SMK, maka penting dilakukan penelitian untuk mengembangkan model PKB yang efektif.

B. Permasalahan.

Berdasarkan pendahuluan di muka maka dalam penulisan makalah ini dapat dirumuskan permasalahan-permasalahanyang ada sebagai berikut: (1) Model PKB yang seperti apakah yang efektif sesuai dengan kebutuhan guru dan institusi SMK?; (3) Bagaimanakah pelaksanaan unsur-unsur PKB yang telah dikembangkan dalam meningkatkan penilaian kinerja guru?; (4) Indikator apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan unsur-unsur PKB dalam meningkatkan penilaian kinerja guru?

C. Pembahasan.

Dengan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK yang efektif, profesionalisme guru SMK yang diharapkan terwujud akan dapat direalisasikan. Untuk dapat mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan PKB dan pengembangan profesional guru SMK tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan di Indonesia merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Indonesia menempatkan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk menyiapkan lulusan bekerja atau melanjutkan kejenjang lebih tinggi atau bekerja mandiri berwirausaha (Sudira, 2012: 13). Sebagai bagian dari sistem pendidikan menengah sekolah menengah

kejuruan (SMK) menurut Kuswana (2013: 198-199) memiliki tujuan secara umum dan secara khusus. Secara umum SMK bertujuan: (1) menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak; (2) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik; (3) menyiapkan peserta didik agar menjadi warga Negara yang mandiri dan bertanggung jawab; (4) menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan (5) menyiapkan peserta didik agar dapat menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Sedangkan secara khusus SMK bertujuan: (1) menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dunia industry (DU/DI) sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati; (2) membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya; dan (3) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (4) membekali peserta didik agar mampu berusaha mandiri di masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan menekankan pengembangan keterampilan kejuruan dan sikap kewirausahaan serta peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keahlian bidang tertentu sebagai bekal bagi peserta didik terutama untuk memasuki dunia kerja. Di samping itu, pendidikan kejuruan juga memberikan bekal pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik langsung maupun setelah memasuki dunia kerja.

2. Profesi dan Profesionalitas Guru smk

Dalam bidang pendidikan, guru merupakan salah satu jabatan atau pekerjaan yang menuntut profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Pada prinsipnya profesionalitas guru tidak lepas dari hakikat guru sebagai pendidik, dimana profesionalitas guru tercermin dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang menuntut kompetensi tertentu. Lebih lanjut menurut Kubow & Fossum (Surya Dharma, 2013: 233), dalam konteks guru sebagai sebuah profesi terdapat dua orientasi profesionalisme guru yakni: (1) Profesionalitas terbatas, yaitu seseorang guru yang memiliki kemampuan hanya pada mengajar, menggunakan kewenangan sebagai guru sepenuhnya di dalam kelas, serta melakukan pengajaran dengan baik; (2) Profesionalitas terbuka, yaitu seorang guru yang melihat tanggung jawabnya lebih besar dalam hal mengembangkan kelas, dan juga siap bekerjasama dengan teman guru dalam mengembangkan berbagai hal serta juga melakukan evaluasi terhadap kualitas mengajarnya sendiri.

Guru yang profesional memerlukan pemahaman mengenai ilmu yang mendasari profesinya, sebab tidak semua orang mampu mengajar baik, dan karena itu ia tidak otomatis menjadi seorang pengajar yang profesional. Seseorang berhak menyandang profesi sebagai guru apabila telah memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan atau sertifikat yang diberikan oleh lembaga yang berwenang atas penilaiannya untuk memberikan kualifikasi tersebut. Penilaian terhadap kemampuan dan keterampilan serta kompetensi guru dalam menjalankan tugas, khususnya yang berkembang saat ini, antara lain melalui uji kompetensi guru, penilaian kinerja guru, uji kompetensi di dunia usaha dan industri melalui ujian di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Dengan demikian, profesionalitas menuntut seorang guru tidak hanya semata-mata sebagai pengajar yang melakukan *transfer of knowledge* dan *transfer of value* belaka pada peserta didik, akan tetapi guru juga harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan paradigma yang dikembangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dengan kondisi demikian guru harus senantiasa berusaha memahami tuntutan standar profesi, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang bermutu tinggi, dan mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi.

Menurut Frantz (1997: 10), komponen yang sangat vital dalam menyiapkan tamatan SMK sebagai tenaga kerja yang berkualitas baik adalah guru dengan kemampuan menghubungkan proses pembelajaran dengan kebutuhan tempat kerja. Guru guru seharusnya disiapkan untuk tidak terfokus pada mata pelajaran, tetapi lebih pada hubungan kontekstual

antara masalah subjek dan kerja terpadu berdasarkan konteks yang bermakna bagi siswa pada saat pembelajaran. Penguasaan materi dan keterampilan dasar harus digunakan dengan strategi-strategi pengajaran yang terpadu antar disiplin ilmu untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam penggunaan-penggunaan yang terkait dengan pekerjaan di dunia nyata.

Sementara itu, menurut Miller Melvin D (Surya Dharma, 2013: 232), mengemukakan bahwa guru kejuruan harus kompeten baik secara profesional maupun okupasional. *“Teacher of vocational education are both professionally and occupationally competent. Teacher are the most important and critical element in vocational education. The values, skill, professional knowledge, experience, and human relations factors that a teacher possesses largely determint the quality of learning opportunities that occur in the name of vocational education.*

Sehingga sangat jelas bahwa guru SMK sudah seharusnya melakukan pengembangan pengetahuan maupun keterampilannya baik secara substansi kejuruan maupun hal yang berkaitan dengan keterampilan mengajar.

3. Pengembangan Keprofesional berkelanjutan guru SMK

Pengembangan keprofesional berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru dapat memeliharanya, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan ketrampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara professional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Melalui siklus evaluasi, refleksi pengalaman belajar, perencanaan dan implementasi kegiatan pengembangan keprofesional guru secara berkelanjutan, maka diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan kompetensi pedagogik, professional, sosial, dan kepribadian untuk kemajuan karirnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru. pelaksanaannya didasarkan pada unsur-unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, prinsip pelaksanaan dan lingkup pelaksanaan kegiatan.

Menurut Permeneg PAN dan RB nomor 16 Tahun 2009 unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi: (1) pengembangan diri; (2) Publikasi Ilmiah; dan (3) karya inovatif. Masing-masing unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau seni. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui diklat fungsional dan/atau kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru.
- 2) Publikasi Ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- 3) Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusun standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mencakup ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekedar untuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu. Guru tetap wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan kejuruan, khususnya PKB yang berhubungan dengan guru SMK terutama dalam pengembangan kompetensi kejuruan atau kompetensi bidang studi dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kegiatan. Alternatif kegiatan tersebut adalah konsep Model Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK dengan pola Estafet.

D. Kesimpulan

Efektifitas guru merujuk pada dampak kinerja guru terhadap siswa. Kemampuan guru membantu siswa untuk meraih hasil belajar yang diinginkan disebut efektifitas guru. Seberapa jauh keefektifan guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, dan pengajar tergantung pada dua hal. Pertama, tergantung pada perilaku guru saat mengajar yang kemudian disebut “kinerja guru”. Kedua, tergantung pada pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan (atau diyakini dibutuhkan) guru yang kemudian disebut “kompetensi guru”.

Kompetensi (*Competency*) guru didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai professional yang mungkin dimiliki dan dimiliki yang dipercaya relevan dengan keberhasilan praktik pengajaran. Kompetensi guru juga merupakan kemampuan umum (pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai professional) untuk memecahkan problem profesi..

Seberapa banyak kompetensi yang dimiliki guru berpengaruh terhadap kinerja guru dalam mengajar. Guru yang memiliki kompetensi minim, diyakini bahwa kinerja mengajarnya dianggap tidak efektif. Kepribadian guru menentukan keberhasilan guru dalam mendidik siswa, sedangkan keterampilan mengajar ditentukan oleh penguasaan guru terhadap metode, dan teknik-teknik pengajaran termasuk penguasaan media pembelajaran.

E. Daftar Pustaka

- 50 Persen Anggaran untuk Guru. Kesejahteraan perlu diimbani Pembangunan Kualitas (2014 10 Oktober) Harian Kompas.p11.
- Blandford, S. (2003). *Professional Development Manual: A Practical Guide to Planning and Evaluating Successful Staff Development*. London: Pearson Education Limited.
- Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning mapping the terrain. *Educational Researcher*, 3, 3-14.
- Dedi Supriadi. (Ed.). (2002). *Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di indonesia*. Membangun manusia produktif. Jakarta: Dikmenjur.
- Diaz Maggioli, G. (2004). *Teacher-Centered Professional Development*. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
- E. Mulyasa (2012). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Evans, N. R. (1971). *Foundations of vocational education*. Columbus: Merrill Publishing Company.
- Ikhwanuddin Syarif. (2002). *Pendidikan untuk masyarakat baru*. 70 Tahun Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.sc.Ed. Jakarta: Grasindo.
- Investasi Guru Tingkatkan Pendidikan. (2014 6 Oktober) Harian Kompas, p.11
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012) *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*. Buku 1 Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan . Pusat Pengembangan Profesi Pendidik.
- Oemar Hamalik. (2002). *Pendidikan guru*. Berdasarkan pendekatan kompetensi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pautler, A., Jr. (1978). *Teaching technical subject in education and industry*. Urbana: Griffon Press.
- Tidak Diimbangi Peningkatan Mutu. Tunjangan Profesi Guru 2015 Rp 80 T. (2014 16 Oktober) Harian Kompas. P. 16.
- Tilaar, H.A.R. (1999). *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21*. Jakarta: Tera Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. (2012, November). *Memantapka Karakter Bangsa Menuju Generasi 2045*. Makalah disajikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan ke VII, di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas

Wardiman Djojonegoro. (1998). *Pengembangan sumberdaya manusia melalui SMK*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.